

ABSTRAK

Firman Husaeni. Kewenangan Badan Bank Tanah Dalam Mengatur Penggunaan Tanah Terlantar Dihubungkan Dengan Hak Menguasai Negara Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 secara jelas menjelaskan peranan negara dalam mengatur pengelolaan tanah di Indonesia. Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah masalah peruntukan tanah yang dikelola oleh Bank Tanah. Dalam hal ini Bank Tanah diberikan hak pengelolaan dalam rangka ekonomi berkeadilan sesuai Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2022 disisi lain Bank Tanah juga diberikan kewenangan untuk kemudahan investasi, kedua macam peruntukan ini bertolakbelakang (inkonsistensi) dan pembuat kebijakan mengesampingkan eksistensi Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945, karena kepentingan investasi bernuansa profit (keuntungan) sedangkan peruntukan bank tanah tidak bernuansa profit (non profit).

Kegunaan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi/rujukan akademik bagi studi-studi hukum yang akan datang, terutama yang akan mengkaji dan mengembangkan mengenai kewenangan bank tanah serta bahan pertimbangan dan masukan kepada penyelenggara negara (pemerintah).

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis-normatif*, metode penelitian *deskriptif analitis*, sumber dan bahan hukum utama (primer) diambil dari peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini disusun secara sistematis.

Penelitian ini menggunakan Teori Negara Hukum sebagai *Grand Theory*. Teori Tujuan Hukum yang terdiri atas Teori Kepastian Hukum sebagai *Middle Theory*. Teori Keadilan Hukum, dan Teori Kemanfaatan Hukum, serta Teori Hak Menguasai Negara atas Tanah sebagai *Applied Theory*.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu kewenangan Badan Bank Tanah dalam mengatur penggunaan tanah terlantar untuk tiga puluh persen guna reforma agraria dan mempermudah investasi telah membuat suatu norma hukum yang baru dalam sistem pertanahan di Indonesia. Kewenangan tersebut memperkuat hak pengelolaan oleh negara yang menegaskan kembali eksistensi negara dalam kerangka Hak Menguasai Negara atas tanah. Dengan tugas yang berkaitan bersama fungsi-fungsi Bank Tanah beban yang diberikan kepada Bank Tanah amat banyak dan berat. Hambatan terhadap kewenangan Bank Tanah yaitu belum adanya kepastian hukum terhadap kewenangan Badan Bank Tanah setelah Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, perpanjangan dan pembaharuan jangka waktu Hak Atas Tanah diatas Hak Pengelolaan Bank Tanah, terjadinya dikhotomi kedudukan, tugas dan fungsi BT, adanya kelemahan administrasi pada Kantor Pertanahan Kementerian ATR/BPN selaku land administrator dan regulator, belum adanya mekanisme pemberian Hak Milik di atas HPL Bank Tanah yang telah dimanfaatkan secara baik, belum adanya mekanisme permohonan HPL oleh Bank Tanah.

Kata Kunci: Bank Tanah, Tanah Terlantar, Hak Menguasai Negara

ABSTRACT

Firman Husaeni, *The Authority of the Land Bank Agency in Regulating the Use of Abandoned Land is Related to the State's Right to Control Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.*

Based on Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia it clearly explains the role of the state in regulating land management in Indonesia. The problem that arises in this research is the problem of land allocation which is managed by the Land Bank. In this case the Land Bank is given management rights in the framework of a just economy in accordance with Article 2 Paragraph (2) Government Regulation Number 64 of 2022 on the other hand the Land Bank is also given the authority to facilitate investment, these two types of designations are contradictory (inconsistency) and policy makers override the existence of Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia because investment interests are profit while the land bank allocation is not profit.

The usefulness of this research can be used as an academic reference/reference for future legal studies, especially those that will examine and develop the authority of the land bank as well as material for consideration and input to state administrators (government).

This type of research uses juridical-normative research, descriptive analytical research methods, sources, and main legal materials (primary) are taken from the legislation. Data analysis techniques in this study were arranged systematically.

This study uses the rule of law theory as the grand theory. Theory of Legal Purpose which consists of Legal Certainty Theory as Middle Theory. Theory of Legal Justice, and Theory of Legal Usefulness, and Theory of State Controlling Rights over Land as Applied Theory.

The result of this research is that the authority of the Land Bank Agency in regulating the use of abandoned land for thirty percent for agrarian reform and facilitating investment has created a new legal norm in the land system in Indonesia. This authority strengthens the right of management by the state which reaffirms the existence of the state within the framework of the State's Right to Control over land. With tasks related to the functions of the Land Bank, the burden given to the Land Bank is very large and heavy. Barriers to the authority of the Land Bank, namely the absence of legal certainty over the authority of the Land Bank Agency after the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, extension and renewal of the term of Land Rights over Land Bank Management Rights, the occurrence of a dichotomy of the position, duties and functions of BT, the existence of administrative weaknesses in the Land Office of the Ministry of ATR/BPN as land administrators and regulators, there is no mechanism the granting of Ownership Rights over the Land Bank's HPL which has been used properly, there is no mechanism for applying for management rights by the Land Bank.

Keywords: Land Bank, Abandoned Land, State Controlling Rights